

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)
DENGAN VARIABEL MODERATOR AKUNTABILITAS,
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Karanganyar)**



NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:
RIYA FITRIYANA
B 200 090 261

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**

ABSTAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dengan menggunakan data primer, mengenai pengaruh pengetahuan dewantentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Pengertian Pengawasan keuangan daerah adalah tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar pemerintah daerah dan pengeluaran daerah tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran.

Sampel yang digunakan adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan sampel jenuh (sensus). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 dan kuisisioner yang kembali serta dapat diolah dalam analisis data ada 37 kuisisioner. Metode pengujian instrument pada uji validitas menggunakan korelasi product moment, sedangkan realibilitasnya di uji crobact alpha. Teknik analisisdata yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup regresi linear berganda, uji F, Uji R^2 dan uji t. Semua data yang diperoleh, diolah dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas dan heteroskedastitas. Dalam uji Validitas dan menunjukkan bahwa semua item valid dan reliabel. Adapun uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan bahwa data brdistribusi normal, dan terbebas dari multikolonearitas dan heteroskedastitas.

Berdasarkan hasil pengujian statistik t_{hitung} probabilitas pengetahuan dewan sebesar 0,002 ($p < 0,05$), t_{hitung} probabilitas akuntabilitas sebesar 0,698 ($p > 0,05$), t_{hitung} probabilitas partisipasi masyarakat sebesar 0,860 ($p > 0,05$), t_{hitung} probabilitas transparansi kebijakan publik sebesar 0,021 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan dengan Transparansi kebijakan publik yang berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan untuk variabel yang lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuanagn daerah karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Kata Kunci: Pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah (APBD).

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi ilmiah dengan judul.

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN VARIABEL MODERATOR AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK (*Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Karanganyar*).

Yang ditulis oleh **Ria Fitriana** dengan NIM : **B 200 090 261**

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi ilmiah tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing II


(Eny Kusumawati, SE, Ak.)

Pembimbing I


(Drs. Agus Endro Suwarno, Msi)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, S.E, M.Si.)

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyalurkan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Implikasi positif dari berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di berbagai daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).

Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi. Untuk mendukung akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi diperlukan *internal control dan eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Secara umum, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: fungsi legislasi (fungsi pembuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran.

Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih disebabkan pengetahuan dewan anggaran ataukah lebih disebabkan permasalahan yang lain. Di samping itu, apakah akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah dan untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

a. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009) akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta dan bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan APBD), Yayasan, Universitas, Organisasi Politik dan Organisasi Masa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

b. Standar Akuntansi Pemerintah.

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar

akuntansi pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip yang tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

2. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan dan belanja dalam jangka waktu tertentu. Anggaran adalah rangkaian proses pengambilan keputusan berkaitan dengan tindakan pemerintah yang akan dilakukan, bagaimana sumberdaya dialokasikan, dihemat dan digunakan untuk mencapai tujuan. Miller et al. 2001 dalam Vian (2010) menyatakan proses penganggaran berhubungan dengan penetapan kebijakan dan pelaksanaan program, dan digunakan untuk mempermudah pembuatan keputusan, memperkirakan ketersediaan sumber daya, menerapkan bagaimana komitmen sumber daya dapat diimplementasikan ke tingkat pelayanan.

3. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 ayat 5 pengertian keuangan PP No. 58 Tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (17), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Baswir, 1999).

4. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (dewan/agent) untuk memberikan tanggung jawab menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat/principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi, prioritas dan advokasi anggaran serta masyarakat terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pengawasan anggaran.

6. Transparasi Kebijakan Publik

Transparasi kebijakan publik adalah persepsi responden tentang adanya keterbukaan mengenai anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat.

7. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran (APBD).

C. Metode Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006: 61). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan pada DPRD Kabupaten Karanganyar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, dana, tenaga, dan waktu,

maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel diambil dari populasi yang betul-betul mewakili (Sugiyono, 2006: 62).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode survey yakni data primer yang membutuhkan adanya komunikasi antara peneliti dengan responden, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik penyebaran datanya menggunakan kuisisioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab responden. Daftar pertanyaan (kuisisioner) dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner penelitian Sopanah dan Mardiamo (2003), kemudian peneliti kembangkan lagi disesuaikan dengan situasi, teori terkait, dan penambahan variabel moderasi.

4. Teknik Pengujian Data dan Metode Analisa Data

a. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji Validitas yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner. Kuisisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2005: 45). Mengukur tingkat validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor tiap item dengan total skor variabel mengkorelasikan antara skor tiap item dengan total skor variabel.

2) Uji Reliabilitas

Untuk mengukur reliabilitas dengan uji *statistic cronbach alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0.6 (Ghozali, 2005: 42). Uji reliabilitas ini dapat menunjukkan konsistensi instrument pengukuran dalam mengukur gejala yang sama.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendeteksi normal. Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) jika nilai hasil uji K-S > dibandingkan taraf signifikan 0,05 maka sebaran data menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas (Ghozali, 2005: 114).

2) Uji Heteroskedastitas

Untuk menguji pengaruh heteroskedastitas dalam penelitian ini, menggunakan pengujian *Corelasi Sperman's rho*. Apabila nilai signifikan < 0,06 maka ini menunjukkan telah terjadinya heteroskedastitas.

3) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Nilai cut off yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,01 atau sama dengan nilai VIF > 10. Apabila nilai VIF dibawah nilai 10 dan nilai tolerance value diatas 0,01 maka menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2005: 92).

c. Metode Pengujian Hipotesis

1) Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda berkenaan dengan studi ketergantungan suatu variabel, variabel tak bebas pada suatu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan dengan maksud menaksir nilai rata-rata hitung (mean) atau rata-rata (populasi) variabel tak bebas, dipandang dari segi nilai yang diketahui atau

tetap (dalam pengambilan sampel berulang) variabel yang menjelaskan.

a) Untuk menguji hipotesis 1 (H1)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana Y = Pengawasan Keuangan Daerah APBD

α = Konstanta

X₁ = Pengetahuan dewan tentang anggaran

b) Untuk menguji hipotesis 2 (H2)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

X₁ = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

X₂ = Partisipasi masyarakat

X₁, X₂ = Interaksi antara X₁ dan X₂

e = Koefisien regresi

c) Untuk menguji hipotesis 3 (H3)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_3 + \beta_5 X_1 X_3 + e \dots \dots \dots (3)$$

Dimana: Y = Pengawasan keuangan daerah (APBD)

X₃ = Akuntabilitas

X₁, X₃ = Interaksi antara X₁ dan X₃

e = Koefisien Regresi

d) Untuk menguji hipotesis 4(H4)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_6 X_4 + \beta_7 X_1 X_4 + e \dots \dots \dots (4)$$

Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

X₄ = Transparasi Kebijakan Publik

X₁, X₄ = Interaksi antara X₁ dan X₂

e = Koefisien Regresi

2) Uji F

Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simulat berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada pengaruh perbedaan varian

antara variabel independen dan dependen, uji f tersebut menggunakan level of signifikan sebesar 95% ($\alpha=5\%$). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya *variabel independen* secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* / jika probabilitas lebih kecil dari 0,05.

b) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya *variabel independen* secara individu tidak berpengaruh signifikan / jika probabilitas lebih besar dari 0,05.

3) Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R^2)

Koefisien determinasi R^2 ini untuk menguji seberapa besar R^2 menunjukkan signifikan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, Nilai R^2 dikatakan baik jika diatas 0,5 karena besarnya koefisien adalah antara nol dan satu, semakin mendekati satu maka dikatakan signifikan.

4) Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan computer dan menggunakan program SPSS. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} atau melihat nilai t dengan tingkat signifikan sebesar 9%.

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut:

a) $H_0 : \beta_1 \neq 0$ tidak ada pengaruh antara X_n dan Y

$H_0 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh antara X_n dan Y)

Keterangan

Adapun kriteria Uji t adalah sebagai berikut:

X_n = variabel independen

Y = variabel dependen

b) Menentukan tingkat signifikan (α) sebesar 5%,

$t_{tabel} : t(\alpha/2 : n-1)$.

c) Menentukan kriteria pengujian dengan menggunakan uji t.

Adapun kriteria uji t adalah sebagai berikut:

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya *variabel independen* secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap *variabel dependen* maka H_0 diterima.

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya *variabel independen* secara individu tidak berpengaruh terhadap *variabel dependen* maka H_0 ditolak.

D. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} variabel Pengetahuan Dewan (X_1) sebesar 3,364 yang menunjukkan lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,036 atau $3,364 > 2,036$, dengan nilai *p-value* sebesar 0,002 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$) maka terdukung secara statistik sehingga Pengetahuan Dewan (X_1) berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Sehingga hipotesis 1 yang menyatakan Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) diterima.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} kombinasi variabel Pengetahuan Dewan (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) sebesar 0,027 yang menunjukkan lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,036 atau $0,027 < 2,036$, dengan nilai *p-value* sebesar 0,698 ditolak pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$) maka tidak terdukung secara statistik sehingga kombinasi variabel Pengetahuan Dewan (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Artinya variabel akuntabilitas tidak bisa memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga hipotesis 2 yang menyatakan Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) ditolak.

Nilai t_{hitung} kombinasi variabel Pengetahuan Dewan (X_1) dan Partisipasi Masyarakat (X_3) sebesar 0,178 yang menunjukkan lebih kecil dari t_{tabel}

sebesar 2,036 atau $0,178 > 2,036$, dengan nilai *p-value* sebesar 0,860 ditolak pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$) maka tidak terdukung secara statistik sehingga kombinasi variabel Pengetahuan Dewan (X_1) dan Partisipasi Masyarakat (X_3) tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Artinya variabel partisipasi masyarakat tidak bisa memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga hipotesis 3 yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) ditolak.

Nilai t_{hitung} kombinasi variabel Pengetahuan Dewan (X_1) dan Transparansi Kebijakan Publik (X_4) sebesar 2,423 yang menunjukkan lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,036 atau $2,423 > 2,036$, dengan nilai *p-value* sebesar 0,021 diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$) maka terdukung secara statistik sehingga kombinasi variabel Pengetahuan Dewan (X_1) dan Transparansi Kebijakan Publik (X_4) berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Artinya variabel transparansi kebijakan publik bisa memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga hipotesis 4 yang menyatakan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) diterima.

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pengujian hipotesis 1 diketahui bahwa variabel Pengetahuan Dewan (X_1) terdukung secara statistik sehingga variabel Pengetahuan Dewan (X_1) berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Sehingga hipotesis 1 yang menyatakan Pengetahuan dewan

tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) diterima.

- b. Berdasarkan pengujian hipotesis 2 diketahui bahwa kombinasi dari variabel Pengetahuan Dewan (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) tidak terdukung secara statistik sehingga kombinasi variabel Pengetahuan Dewan (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y).
- c. Berdasarkan pengujian hipotesis 3 diketahui bahwa kombinasi dari variabel Pengetahuan Dewan (X_1) dan Partisipasi Masyarakat (X_3) tidak terdukung secara statistik sehingga kombinasi variabel Pengetahuan Dewan (X_1) dan Partisipasi Masyarakat (X_3) tidak berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y).
- d. Berdasarkan pengujian hipotesis 4 diketahui bahwa kombinasi dari variabel Pengetahuan Dewan (X_1) dan Transparansi Kebijakan Publik (X_4) terdukung secara statistik sehingga kombinasi variabel Pengetahuan Dewan (X_1) dan Transparansi Kebijakan Publik (X_4) berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Y).

2. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian, sehingga saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperbanyak jumlah sampel penelitian.
- b. Pada penelitian selanjutnya diharapkan memperluas obyek penelitian sehingga masih dimungkinkan ada hasil yang berbeda seandainya mengambil beberapa DPRD di karesidenan Surakarta untuk dijadikan sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Govindarajan. 2003. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat.
- Arifiyadi, Teguh SH. 2008. *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Yogyakarta.
- Ayu, Nimas. 2012. *Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat sebagai Moderasi. (Studi di DPRD di Kota Medan)*. *Jurnal Mediasi*, Volume 4, Nomor 4, Hal. 49-58.
- Baswir, Revrison. 1999. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, Edisi Tiga. Yogyakarta: BPF Baswir, Revrison. 1999. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, Edisi Tiga. Yogyakarta: BPF.
- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar*.
- Darma, Hasibuan. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderating. (Studi di DPRD di Kota Medan)*. *Jurnal Mediasi*, Volume 4, Nomor 4, Hal. 49-58.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)*. SNA III. Purwokerto.
- Purwanta, Suharyadi. 2007. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.